

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berubahnya kapabilitas perekonomian India sebagai akibat dari reformasi perekonomian pada 1990, India memperdalam upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan strategis dengan negara-negara yang memiliki potensi strategis bagi India. Upaya kerja sama ini dimulai dari kebijakan luar negeri *Look East Policy* yang menjadi fokus kebijakan luar negeri India untuk lebih melebarkan sayap hubungan luar negeri India terhadap negara-negara di bagian Timur seperti negara-negara anggota *ASEAN*.¹ Khususnya kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjalin hubungan kembali terhadap negara-negara tersebut setelah sebelumnya terhalang akibat dari kondisi politik Perang Dingin.² Pendekatan ini juga dilakukan sebagai akibat dari tuntutan globalisasi yang mendorong India untuk lebih mengintegrasikan peran India pada dunia. Serta kebijakan ini muncul sebagai respons kurang berhasilnya kerangka kerja sama regional di wilayah Asia Selatan pada saat itu.³

Pada periode pasca 1990 kebijakan luar negeri India memiliki kecenderungan untuk membangun hubungan bilateral yang lebih substantial melalui upaya-upaya peningkatan hubungan diplomatik. Instrumen yang digunakan dalam agenda tersebut adalah kerangka kerja sama dengan organisasi regional (*dialogue*

¹ Thongkholal Haokip. 2011. *India's Look East Policy : Its Evolution and Approach*. South Asian Survey, Vol. 18 No. 2, Hlm. 245

² Muhammad Fathullah. 2017. *Dari Look East ke Act East : Skripsi Thesis*. Unair Repository. Tersedia di <http://repository.unair.ac.id/69825/>

³ Ibid.

partnership) dan *strategic partnership* dengan objektif untuk memperdalam hubungan diplomatik India melalui aspek-aspek yang luas mulai dari sektor keamanan dan ekonomi hingga kesehatan dan budaya.⁴ Terhitung hingga tahun 2020 India memiliki 29 hubungan *strategic partnership* dengan mitra-mitra negara dan organisasi regional.⁵ Mitra-mitra seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Israel dan ASEAN selama ini menjadi mitra utama India dalam mencapai kepentingan strategisnya yakni menjamin pertumbuhan perekonomian dan keamanan nasional.⁶ Penggunaan pendekatan hubungan bilateral yang ditingkatkan menjadi upaya India untuk bertahan dalam dinamika politik Internasional yang semakin tidak pasti namun mengharuskan agar tetap tercapainya kepentingan nasional India.⁷ Penggunaan metode *strategic partnership* dan kemitraan lain pada dasarnya digunakan untuk mencapai empat tujuan utama India yaitu memajukan pembangunan ekonomian dan sosial, meningkatkan keamanan nasional India dari ancaman internal dan eksternal, meningkatkan status India dan mengembangkan perannya di hubungan internasional, serta mempromosikan cita-cita dan nilai politik dan sosial India diluar negaranya.⁸ Hal ini merupakan strategi *multialignment* yang memberikan India ruang untuk tidak terlalu bergantung pada satu mitra saja khususnya negara-negara *major power* seperti Amerika Serikat dan Cina namun

⁴ The Diplomat. 2013. *Why Does India Have So Many 'Strategic Partners' and No Allies?*. Tersedia di <https://thediplomat.com/2013/11/why-does-india-have-so-many-strategic-partners-and-no-allies/>

⁵ Ian Hall. 2016. *Multialignment and Indian Foreign Policy under Narendra Modi*. The Round Table. The Commonwealth Journal of International Affairs, Vol. 105, No. 3, Tersedia di <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00358533.2016.1180760?journalCode=ctr20>

⁶ The Diplomat, Op. Cit.

⁷ Ian Hall, Loc Cit

⁸ Ian Hall, Op. Cit hal 2

juga mitra lainnya.⁹ Hal ini menjamin India untuk tetap mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mitra-mitra yang beragam dan menjamin kemitraan tersebut dapat menanggulangi isu-isu tertentu.

Di bawah kepemimpinan Modi, India mengedepankan perbaikan hubungan dengan negara-negara tetangganya di wilayah Asia Selatan serta mengidentifikasi mitra-mitra potensial nontradisional. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui inisiasi pembaruan kebijakan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* yang memperluas jangkauan mitra serta bentuk hubungan yang akan dibangun oleh India terhadap negara-negara dalam kebijakan tersebut.¹⁰ Kebijakan ini didasarkan dengan prinsip 3C (*Culture, Commerce, Connectivity*) dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas India terhadap wilayah Asia dan memperluas integrasi ekonomi India dengan negara-negara di Asia Timur.¹¹ Jika sebelumnya *Look East Policy* lebih ditujukan bagi mitra di ASEAN, *Act East Policy* menambahkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik.¹²

Dalam *Act East Policy* salah satu metode yang digunakan oleh India adalah kerangka strategic partnership terhadap negara-negara di dalam kebijakan tersebut. Seperti

⁹ Ian Hall, Op. Cit hal 12

¹⁰ K. V Kesavan. 2020. *India's 'Act East' Policy and Regional Cooperation*. Observer Research Foundation. Tersedia di <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/>

¹¹ European Foundation for South Asian Studies. 2020. *From Look East to Act East: India's Changing Posture in the Indo-Pacific and the Containment of China*. Tersedia di <https://www.efsas.org/EFAS-Study%20Paper-AEP-July-2020.pdf>

¹² Thomas Lynch III and James J. Przystup, *India-Japan-Strategic Cooperation and Implications for U.S. Strategy in the Indo-Asia-Pacific Region* (Washington D.C.: Center for Strategic Research, Institute for National Strategic Studies, National Defence University, 2017), 10. dalam K. V Kesavan. 2020. *India's 'Act East' Policy and Regional Cooperation*. Observer Research Foundation. Tersedia di <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/>

yang telah dinyatakan oleh Narendra Modi pada 17th ASEAN-India Summit bahwa hubungan strategic partnership ASEAN-India menjadi landasan penting di dalam kebijakan *Act East Policy*.¹³ Kemudian setelah meluncurkan *Act East Policy* India melakukan peningkatan level *strategic partnership* menjadi *Special Strategic Partnership* terhadap Korea Selatan pada 2015. Hal serupa juga dilakukan India terhadap Vietnam pada 2016 menjadi *Comperhensive Strategic Partnership*.

Salah satu negara tujuan yang menjadi salah satu mitra nontradisional India dalam kebijakan *Act East* adalah Korea Selatan. Korea Selatan dan India telah menjalin hubungan diplomatik yang didasari oleh kepentingan perdagangan yang kemudian berkembang menjadi hubungan strategis dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* pada 2010 yang menjadi titik penting bagi perkembangan hubungan substantif keduanya.¹⁴ Seiring dengan perkembangan yang baik terhadap kerja sama tersebut Modi menjabat sebagai Perdana Menteri mulai menaruh Korea Selatan sebagai salah satu fokus dalam kebijakan luar negeri India melalui *Act East Policy*.¹⁵ Kemudian pada 2015 Narendra Modi mengunjungi Korea Selatan dan menandatangani *Special Strategic Partnership Agreement* dengan Korea Selatan sebagai pembabakan baru dalam perkembangan hubungan India-Korea Selatan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan mitra penting bagi India dalam pembabakan baru dalam kebijakan luar negerinya.

¹³ Zee Media. 2020. *Strategic partnership with ASEAN core of India's Act East Policy*, says PM Narendra Modi. Tersedia di <https://zeenews.india.com/india/asean-india-summit-strategic-partnership-with-asean-core-of-indias-act-east-policy-says-pm-narendra-modi-2324372.html>

¹⁴ Jojin V. Jhon. 2020. *India-South Korea Relations Under 'Special Strategic Partnership: 'Act East Policy' Meets 'New Southern Policy*. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*. Vol. 76, Issue 2 hlm. 207-225

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari metode memperluas dimensi hubungan bilateral melalui *strategic partnership* dalam kebijakan *Act East Policy*, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Mengapa India mengeluarkan kebijakan *Act East Policy* terhadap Korea Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan secara argumentatif latar belakang atau faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India memilih Korea Selatan dalam *Act East Policy*. Disamping itu, dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika hubungan India dan Korea Selatan dalam politik internasional pada masa mendatang maka penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam menganalisis perkembangan hubungan India-Korea Selatan pada masa mendatang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Partner Selection dalam Strategic Partnership*

Konseptualisasi terhadap *strategic partnership* sebenarnya sudah banyak dilakukan namun belum terdapat sebuah konsensus terkait definisi umum terhadapnya. Hal ini berkaitan erat dengan sifat dari definisi *strategic partnership* yang sangat tergantung dari studi kasus yang diamati sehingga definisi universal terhadapnya masih belum disetujui oleh para akademisi.¹⁷ Namun secara garis besar para akademisi yang memberikan konseptualisasi terhadap *strategic partnership* menyatakan bahwa *strategic partnership* merupakan sebuah arketipe dari *alignment*.¹⁸ Secara umum *strategic partnership* menggambarkan kondisi peningkatan hubungan bilateral menjadi kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategis bersama. Koordinasi dalam mencapai tujuan strategis tersebut diperlukan dalam sebuah *strategic partnership*.¹⁹

Mengutip pendapat dari Thomas Wilkins

“strategic partnership is structured collaboration between states (or other actors) to take joint advantage of economic opportunities, or to respond to security challenges more effectively than could be achieved in isolation. Strategic partnering occurs both in and between the international and domestic sectors (levels). Besides allowing information, skills, and resources to be shared, a strategic partnership also permits the partners to share risk.”

¹⁷ Georg Strüver. 2016. *International Alignment between Interest and Ideology: The Case of China's Partnership Diplomacy*. Giga Research Programme : Power and Ideas, No. 283.

¹⁸ Thomas Wilkins. 2011. *Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation*. *Review of International Studies*, Vol. 38, No. 1, Hlm 53-57

¹⁹ Ieva Gajauskaite. 2013. *Strategic Partnerships in Foreign Policy: Comparative Analysis of Polish - Ukrainian and Lithuanian - Ukrainian Strategic Partnerships*. *Lithuanian Annual Strategic Review*, Vol. 11, No. 1 Hlm. 189-229

Definisi tersebut diambil dari definisi serupa yang dimiliki oleh studi bisnis dan organisasi.²⁰

Sedangkan Ieva Gajauskaite berpendapat bahwa

*“Strategic partnerships can reflect cooperation for the purpose of reaching a common strategic goal; that is, strategic bilateral relations are defined by the strategic objectives and cooperation required for achieving these objectives. However, in order to form common objectives states have to identify and match their national interests.”*²¹

Melihat dari definisi tersebut maka sebuah *strategic partnership* merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan berdasarkan kepentingan-kepentingan strategis di antara aktor-aktor yang terlibat untuk dapat mencapai kepentingan yang sudah disepakati. Kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk menanggulangi tantangan-tantangan serupa yang dialami para aktor yang terlibat dan mengambil kesempatan baik pada sektor-sektor tertentu.²² Kerja sama ini memiliki sifat yang lebih fleksibel dan tidak mengikat sehingga memungkinkan bagi negara untuk bekerja sama tanpa mengganggu otonomi masing-masing.²³

Kebijakan *strategic partnership* secara garis besar memiliki perkembangan melalui tahapan formasi, implementasi, dan evaluasi.²⁴ Tahapan formasi ditandai dengan pemilihan mitra yang cocok, menentukan kepentingan-kepentingan bersama, dan

²⁰ Thomas Wilkins. Op.Cit hal 363

²¹ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 191

²² Parashanth Parameswaran. 2014. *Explaining US Strategic Partnership in the Asia-Pacific Region: Origins, Developments and Prospects*. Contemporary Southeast Asia, Vo. 36, No. 2 hal 264

²³ Ibid.

²⁴ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 194

formalisasi kerja sama.²⁵ Kemudian tahapan implementasi ditandai dengan dibentuknya struktur kerja sama, adanya interaksi secara terus menerus, dan implementasi agenda kerja sama.²⁶ Sedangkan tahapan evaluasi berkaitan dengan tahapan evaluasi pencapaian yang telah didapatkan melalui kerja sama tersebut, pembaharuan kerja sama, identifikasi sektor-sektor yang mengalami pencapaian terendah, dan evaluasi kerja sama secara keseluruhan.²⁷

Dalam sebuah *strategic partnership* tahapan awal yang dilakukan oleh negara adalah untuk menentukan mitra yang cocok. Aktor-aktor yang berusaha untuk membentuk sebuah *strategic partnership* setelah menemukan sebuah permasalahan atau isu tertentu yang hendak ditangani akan melakukan evaluasi terhadap calon mitra-mitra potensial. Mitra-mitra potensial tersebut diharapkan menjadi mitra yang cocok sesuai dengan kebutuhan dari inisiator *strategic partnership*.²⁸

Dalam pemilihan mitra yang cocok bagi suatu bentuk kerja sama *strategic partnership* peneliti akan menggunakan indikator pemilihan mitra oleh Ieva Gajauskaite. Gajauskaite berpendapat bahwa kepentingan strategis yang sesuai merupakan salah satu faktor penting dalam memilih mitra. Namun selain itu Gajauskaite berpendapat bahwa faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan dalam melihat kecocokan di antara dua mitra yang berpotensi untuk membentuk sebuah *strategic partnership*. Beberapa faktor lain yang perlu dilihat adalah *values, ideology, real gain potential, partner's power and ability to use this power for its*

²⁵ Ibid.

²⁶ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 197

²⁷ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 198

²⁸ Thomas Wilkins. Op.Cit hal 364

own behalf.²⁹ Selain itu Gajauskaite menambahkan semakin tinggi aspek-aspek yang cocok menunjukkan semakin kedua negara memiliki kepentingan dan kemampuan untuk melengkapi satu sama lain.³⁰

Gajauskaite membagi indikator pemilihan mitra menjadi empat indikator yaitu : (1) kepentingan strategis yang cocok, (2) evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan dari mitra yang berpotensi, (3) evaluasi kekuatan calon mitra dan kegunaannya bagi kepentingan sendiri, (4) kompatibilitas (visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah). Indikator tersebut di atas dapat digunakan dalam melihat alasan pemilihan suatu negara sebagai mitra strategis bagi negara lainnya. Khususnya bagi negara-negara dengan kecenderungan untuk menggunakan metode *strategic partnership* dalam kebijakan luar negerinya.³¹

Untuk memperjelas operasionalisasi indikator pemilihan mitra oleh Gajauskaite dalam menjawab rumusan masalah maka perlu dilakukan penjabaran terakrit masing-masing indikator. Pemilihan mitra dalam *strategic partnership* tidak terbatas pada isu-isu pada bidang tertentu namun bervariasi tergantung kepentingan yang mendasari. Namun dalam penggunaan *strategic partnership* sebagai instrument kebijakan luar negeri negara memiliki kecenderungan untuk memilih mitra yang didasari oleh kapabilitas ekonomi dan diplomasi untuk mencapai keuntungan dalam dua bidang tersebut.³² Hal tersebut menunjukkan bahwa

²⁹ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 195

³⁰ Ibid.

³¹ Georg Ströver Op. Cit. hal 6

³² Georg Ströver Op. Cit. hal 21

pemaknaan setiap indikator perlu dilakukan berdasarkan kerangka kebijakan luar negeri yang mendasari.³³ Maka dalam melihat variabel dalam setiap indikator perlu melihat kepentingan mendasar dalam kebijakan luar negeri yang mendasari ditempuhnya pemilihan mitra yang sesuai untuk mencapai kepentingan tersebut.³⁴ Indikator pertama yaitu kepentingan strategis yang cocok merupakan tahap pertama dalam menetapkan mitra dalam sebuah *strategic partnership*. Indikator ini menandakan adanya kepentingan-kepentingan strategis dari masing-masing negara yang menjadi dasar ditempuhnya sebuah upaya untuk melakukan kerja sama.³⁵ Kepentingan strategis dapat dikatakan sebagai kepentingan antara dua negara yang saling melengkapi antara satu sama lain. Hal ini merupakan kepentingan yang menyangkut struktur dan fitur dari tatanan internasional yang dapat menjamin keamanan negara untuk mencapai kepentingan atau tujuan lainnya.³⁶ Kepentingan lainnya dapat merujuk pada kepentingan nasional yang diformulasikan berdasarkan agenda pembangunan nasional pada sektor-sektor berikut politik dan diplomatik, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, kebudayaan, dan sosial (tidak harus mencakup semuanya karena tergantung dengan kepentingan negara sendiri).³⁷

Karena kerangka kerja sama kemitraan menjadi sebuah instrument dalam kebijakan luar negeri maka dalam melihat kecocokan kepentingan dapat dilakukan dengan

³³ Sean Kay. 2000. *What is a Strategic Partnership ?*. Problems of Post- Communism, Vol. 47, No. 3, hal 16

³⁴ Georg Ströver Op. Cit. hal 24

³⁵ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 192

³⁶ Hugh White. 2009. *A Wobbly Bridge: Strategic Interest and Objectives in Force 2030*. Security Challenges Vol. 5, No. 2 Hal. 21-29, Hlm. 22

³⁷ Georg Ströver Op. Cit. hal 24

melihat kepentingan negara sendiri didalam kebijakan luar negeri tersebut dengan kepentingan negara calon mitra. Maka dari itu hal ini dapat dilihat melalui pernyataan-pernyataan pimpinan negara maupun dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan negara tersebut yang menyatakan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai suatu negara.³⁸

Secara umum takaran kecocokan kepentingan terbagi menjadi empat yaitu : 1) *equal* ; 2) *different but compatible* ; 3) *different but non-excluding* ; 4) *utterly contradictory*. Dalam hal ini secara umum negara akan melakukan upaya membentuk sebuah *strategic partnership* dengan takaran kepentingan yang *equal* atau *different but compatible*.³⁹ Kepentingan ini dapat disebut juga sebagai *complementary interest* yang berarti negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi sehingga dapat menjadi dasar untuk menyepakati sebuah upaya kerja sama terhadap isu tertentu.⁴⁰

Hal ini penting untuk dimiliki karena dalam sebuah upaya kerja sama kedua mitra akan melakukan upaya untuk menggapai kepentingan yang dinilai penting oleh kedua negara atau strategis. Maka dari itu dalam melihat kepentingan strategis yang cocok dapat membandingkan kepentingan-kepentingan negara calon mitra dan negara sendiri dan prioritas untuk mencapai kepentingan tersebut harus dinyatakan dengan sikap yang serupa oleh kedua pihak untuk menjamin adanya upaya yang

³⁸ Lucyna Czechowska. 2013. *The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory*. The Copernicus Journal of Political Studies, Vol. 4, No. 2 (37-51) Hal. 49

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Thomas W. Robinson. 1967. *A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations*. International Studies Quarterly, Vol.11, No. 2 Hal 135

seimbang dari kedua pihak untuk mencapai kepentingan strategis yang cocok tersebut.⁴¹

Seimbangnya tingkat prioritas kepentingan tersebut menjadi takaran kecocokan bagi keduanya untuk bekerja sama. Kepentingan tersebut diharapkan tidak tumpang tindih dan memiliki tingkat prioritas yang sama bagi kedua negara. Khususnya bagi negara yang menggunakan *strategic partnership* sebagai instrumen kemitraan luar negeri perlu melakukan identifikasi terhadap tingkat prioritas kepentingan yang dimiliki dengan negara calon mitra untuk menjamin kepentingan tersebut dapat dicapai melalui upaya kerja sama yang akan dilakukan.⁴²

Indikator kedua yaitu evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan dari mitra yang berpotensi merujuk kepada evaluasi terhadap keuntungan yang akan didapatkan akibat dari menanggung kerugian tertentu atau kerugian yang harus ditanggung demi mendapatkan keuntungan tertentu.⁴³

Sebelum memasuki sebuah kemitraan sebaiknya negara melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang akan didapatkan serta kerugian yang harus ditanggung untuk menjamin efektivitas kerja sama. Mencapai kepentingan politik dan diplomatik, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, kebudayaan, dan sosial (tidak harus mencakup semuanya tergantung dengan kepentingan negara sendiri) merupakan dasar sebuah negara melakukan sebuah kemitraan maka untuk melihat keuntungan dan kerugian dalam memilih mitra dapat dilihat dari keuntungan yang akan diberikan oleh mitra tersebut dalam membantu negara

⁴¹ Ibid.

⁴² Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 194

⁴³ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 193

sendiri untuk mencapai kepentingan tersebut. Sedangkan kerugian yang harus ditanggung merupakan pengorbanan yang dapat diberikan negara sendiri dalam mencapai keuntungan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari kekuatan dan posisi negara baik dalam konteks *strategic partnership* maupun dalam tatanan sistem internasional. Kapabilitas yang dapat didapatkan dengan melakukan kemitraan dengan negara potensial serta melihat kelayakan kapabilitas tersebut dengan kerugian atau biaya yang harus ditanggung oleh negara sendiri demi mendapatkannya. Hal yang perlu dilihat adalah kerugian yang mungkin didapatkan dengan melakukan *strategic partnership* dengan negara yang memiliki kekuatan tidak seimbang dengan negara sendiri. Melakukan kemitraan dengan negara dengan kekuatan terlalu rendah dapat menyumbangkan lebih banyak kerugian akibat dari tidak diperolehnya keuntungan yang sesuai dengan pengorbanan yang akan diberikan. Sedangkan melakukan kemitraan strategis dengan negara yang memiliki kekuatan besar memang akan mendatangkan keuntungan namun kemitraan strategis baru harus dibentuk dengan negara-negara *rising power* lainnya untuk menyeimbangkan posisi negara sendiri dari kondisi yang terlalu condong kepada satu sumber kekuatan saja.⁴⁴

Keuntungan dan kerugian dalam sebuah *strategic partnership* diharapkan berada pada posisi seimbang untuk menjamin kelangsungan kerja sama itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi acuan dalam menentukan ekspektasi terhadap implementasi dan hasil yang didapatkan dalam kemitraan ini. Lebih jauh hal ini dapat dilihat melalui peran-peran yang dapat diberikan dari mitra potensial. Diharapkan peran tersebut

⁴⁴ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 203

dapat terimplementasi dalam agenda kerja sama yang fungsional yang tertuang dalam bidang-bidang diplomatik atau politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, budaya dan sosial.⁴⁵

Melihat keuntungan dan kerugian dapat dilakukan melalui analisis kuantitatif maupun kualitatif oleh negara sendiri. Dalam analisis kuantitatif negara sendiri dapat melihat angka pengeluaran dalam pelaksanaan kerja sama dan keuntungan yang mungkin didapatkan. Sedangkan dalam analisis kualitatif dapat melihat dampak yang diberikan dengan bekerja sama dengan calon mitra.⁴⁶ Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan yang dapat dicapai dengan aset dan kekuatan satu sama lain yang menyebabkan hubungan ini seimbang dan saling melengkapi bagi kedua mitra.

Indikator ketiga yaitu evaluasi kekuatan calon mitra dan kegunaannya bagi kepentingan sendiri. Dalam hal ini setelah mengevaluasi kekuatan yang dimiliki oleh negara calon mitra maka negara sendiri perlu mengevaluasi kekuatan yang mungkin digunakan untuk kepentingan negara sendiri. Kekuatan tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan negara sendiri dalam sektor-sektor yang sudah ditentukan sesuai dengan kepentingan strategis yang dimiliki oleh kedua negara.⁴⁷

Hal ini dapat dilihat melalui area kerja sama yang mungkin dilakukan dan peran-peran yang dapat diambil oleh negara mitra dalam kerja sama tersebut. Kekuatan maupun aset mitra yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan atau

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Niek Mouter. 2019. The Politics of Cost-Benefit Analysis. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press.

⁴⁷ Thomas Wilkins. Op.Cit hal 363

kepentingan negara sendiri perlu diidentifikasi demi membangun ekspektasi yang sesuai terhadap mitra yang dipilih.⁴⁸ Hal ini dapat dilihat melalui kekuatan tersebut dalam mencapai kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik atau melalui kepentingan yang perlu dicapai sesuai dengan kebijakan yang melandasi ditempuhnya kemitraan tersebut.⁴⁹

Indikator keempat adalah kompatibilitas (visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah). Dalam mengukur kompatibilitas selain melihat kepentingan yang cocok hal-hal seperti visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah. Negara dengan visi terhadap sistem internasional yang cocok, ideologi yang sama, nilai-nilai yang selaras serta konteks sejarah yang harmonis memiliki tingkat kecocokan lebih tinggi dalam bekerja sama.⁵⁰

Tingkat kompatibilitas dalam penentuan mitra tidak harus seluruhnya terpenuhi namun dengan semakin banyaknya kecocokan dalam kompatibilitas maka semakin mungkin untuk mempertahankan kemitraan dalam jangka panjang. Semakin rendah tingkat kompatibilitas antara mitra mungkin saja menimbulkan kesulitan dalam memperdalam kerja sama kedua negara.

Kompatibilitas juga menjadi landasan kepercayaan di antara mitra yang terlibat. Negara akan memiliki kepercayaan untuk membangun kerja sama dengan negara yang memiliki tingkat kompatibilitas dengan negara sendiri karena dengan ini akan mempermudah proses komunikasi dan penyelarasan pandangan. Kesamaan dalam

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 201

⁵⁰ Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 194

visi terhadap sistem internasional, nilai-nilai, dan ideologi dapat menandakan adanya kesamaan pandangan dan kecenderungan dalam bertindak sehingga memberikan kesan pemahaman terhadap mitra sehingga dengan mudah menumbuhkan kepercayaan terhadap negara tersebut.⁵¹

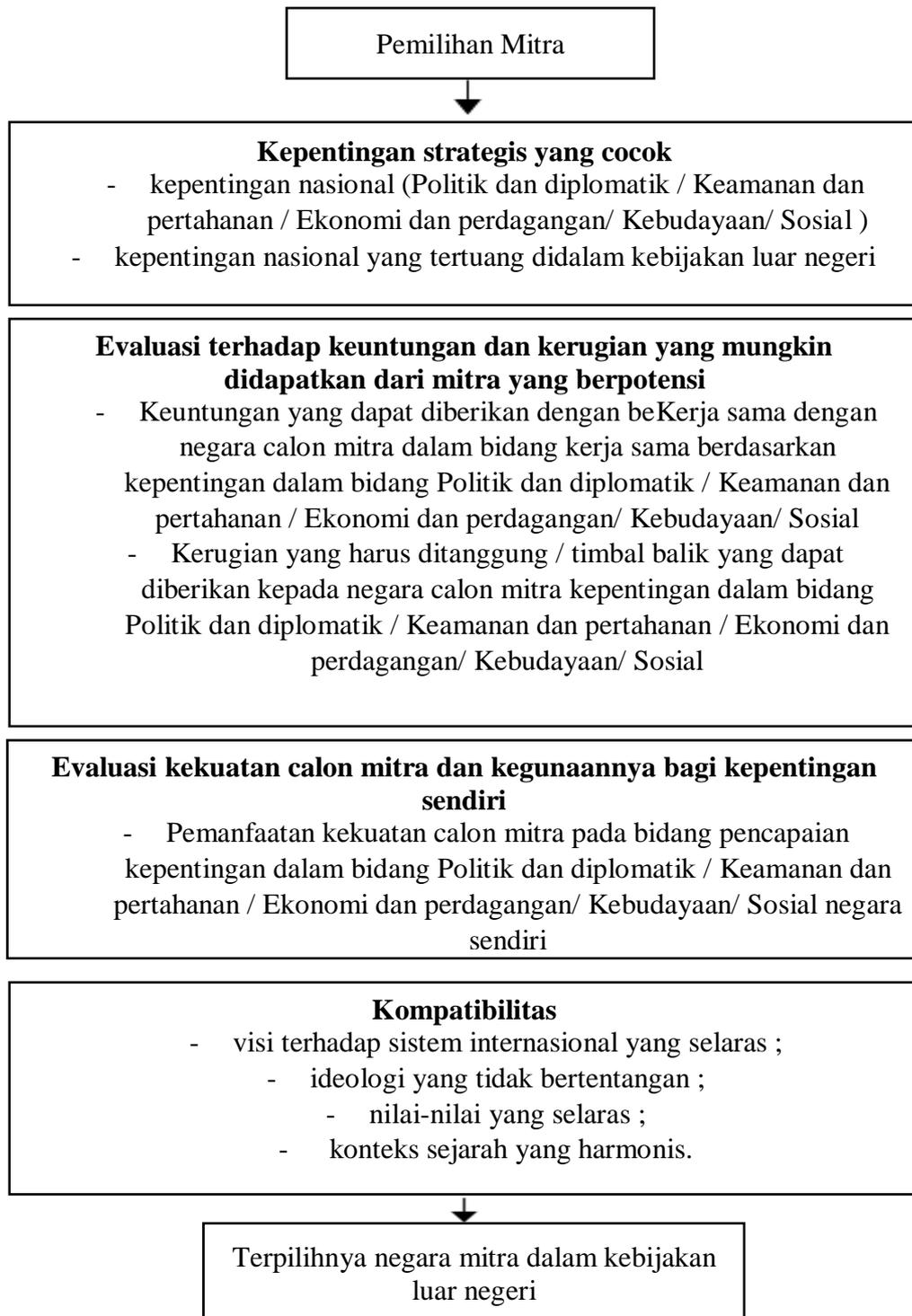
Konteks sejarah yang harmonis dan terbebas dari sengketa memberikan kemudahan dalam mempercayai calon mitra dan memudahkan implementasi kerja sama khususnya dalam bidang yang melibatkan masyarakat. Kondisi sejarah yang is tidak akan menumbuhkan prasangka ataupun sentimen buruk dari masyarakat sehingga penetrasi dampak kerja sama dapat diterima oleh masyarakat sipil kedua negara.⁵²

⁵¹ Priscilla Wholstetter, dkk. 2005. *Strategic Alliances in Action: Toward a Theory of Evolution*. The Policy Studies Journal, Vol. 33 No. 3, hlm 420-442 hal. 430

⁵² Ieva Gajauskaite. Op. Cit hal 195

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya maka terbentuklah sistematika pemikiran sebagai berikut. Dalam menjawab rumusan masalah terkait mengapa sebuah negara mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri terhadap negara lainnya didalam kerangka kemitraan strategis penulis menggunakan indikator *Partner Selection*. Dengan menggunakan indikator *Partner Selection* maka dapat dilihat alasan sebuah negara memilih negara lain untuk menjadi mitra atas dasar tingkat kecocokan yang tinggi dilihat melalui kepentingan strategis yang cocok, tingkat keuntungan yang tinggi dengan memilih sebuah negara sebagai mitra, kekuatan-kekuatan negara calon mitra yang dapat dimanfaatkan, dan kompatibilitas yang baik antara negara sendiri dengan negara calon mitra.

1.6 Argumen Utama

Dengan menggunakan teori *Partner Selection*, pemilihan Korea Selatan sebagai salah satu negara tujuan *Act East Policy* oleh India adalah berdasarkan tingkat kecocokan yang tinggi. Tingkat kecocokan yang tinggi tersebut dilihat dari kepentingan strategis yang cocok, keuntungan yang didapatkan dan pengorbanan yang dapat diberikan dengan bekerja sama dengan Korea Selatan, kapabilitas India dalam memanfaatkan kekuatan Korea Selatan dalam mencapai kepentingan India, dan tingkat kompatibilitas tinggi yang dilihat melalui visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah.

Pertama yaitu kepentingan strategis yang cocok adalah kedua negara sama-sama memiliki kepentingan akan keamanan dan kestabilan kawasan Asia-Pasifik untuk menjamin pertumbuhan perekonomian di bawah kondisi kawasan yang damai dan

aman. Kemudian India dan Korea Selatan menunjukkan keinginan untuk melakukan diversifikasi mitra dalam kebijakan luar negeri yang ditunjukkan oleh dikeluarkannya kebijakan serupa oleh Korea Selatan yaitu *New Southern Policy* pada 2017 dengan tujuan-tujuan yang bersinegri dengan tujuan India dalam *Act East Policy*. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan yang equal di antara keduanya sehingga sangat memungkinkan bagi India untuk memilih Korea Selatan berdasarkan kepentingan strategis yang cocok.

Kedua yaitu keuntungan yang didapatkan dengan memilih Korea Selatan sebagai mitra dalam *Act East Policy* adalah kesempatan bekerja sama dengan negara yang memiliki kemampuan untuk membantu India dalam melaksanakan agenda modernisasi dan pembangunan perekonomian. Di sisi lain kerugian atau pengorbanan yang dapat diberikan India adalah dengan memberikan kesempatan untuk investasi asing dalam sektor-sektor infrastruktur bagi investor Korea Selatan, memberikan akses dan bantuan bagi perusahaan Korea Selatan untuk masuk kedalam pasar India khususnya yang baru akan mulai memasuki pasar India. Hal ini menunjukkan India dan Korea Selatan sebagai calon mitra dengan kekuatan seimbang.

Ketiga yaitu kapabilitas India dalam memanfaatkan kekuatan Korea Selatan dalam mencapai kepentingan India dapat dilihat melalui kesadaran India bahwa Korea Selatan memiliki potensi untuk membantu India dalam mengembangkan agenda modernisasi India. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman pembangunan Korea Selatan, suntikan dana asing sebagai modal pembangunan

melalui proyek infrastruktur, dan teknologi pembangunan yang dimiliki oleh Korea Selatan.

Keempat yaitu tingkat kompatibilitas yang dilihat melalui visi terhadap sistem internasional yang sama dilihat dari visi terhadap tatanan regional yang ‘terbuka, bebas, dan inklusif’, ideologi yang sama yaitu demokrasi dan sejarah hubungan diplomatik yang harmonis dan terbebas dari sengketa.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Teknik penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berkaitan antara satu sama lain.⁵³ Sehingga penelitian ini berfokus pada hubungan kausal antara variabel dependen dengan variabel independen.

Penulis melakukan penelitian terhadap faktor atau latar belakang dari keluarnya sebuah kebijakan.⁵⁴ Dengan melakukan penelitian eksplanatif maka penulis dapat menjelaskan sebab – akibat antara faktor atau variabel dari sebuah fenomena.⁵⁵

Dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif peneliti berusaha untuk menjelaskan sebab akibat dari dipilihnya Korea Selatan oleh India dalam *Act East Policy*.

⁵³ 46 Anol Bhattacharjee, 2012, *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, University of South Florida, hlm. 6.

⁵⁴ Christopher Lamont, 2015, *Research Methods in International Relations*. Sage Publication. hlm. 77 – 95

⁵⁵ Audie Klotz dan Deepa Prakash, 2008, *Qualitative Methods in International Relations : A Pluralist Guide*. USA: Palgrave Macmillan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berkaitan dengan rentan waktu yang dipilih oleh peneliti terhadap data – data dan fenomena yang mendukung sebagai jangkauan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan batas jangkauan waktu dari 2014 hingga 2019. Hal ini dikarenakan kebijakan *Act East Policy* dikeluarkan pada tahun 2014 dan telah berjalan hingga tahun 2019. Namun terkait faktor – faktor yang mendukung dapat dilihat semenjak ditandatanganinya Kerja sama *Strategic Partnership* India - Korea Selatan pada 2010 yang mendasari perkembangan dinamika India – Korea Selatan untuk lebih jauh mengeluarkan sebuah kebijakan *Act East Policy* .

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh data empiris dan informasi dengan menggunakan metode tertentu dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui berbagai material yang terdapat di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, laporan, dan literatur lain.⁵⁶ Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang akan digunakan akan diperoleh melalui sumber primer yaitu situs resmi pemerintahan dan situs resmi organisasi internasional. Serta sumber sekunder yakni

⁵⁶ Mardalis, 1999 dalam Abdi Mirzaqon T. dan Budi Purwoko, 2018. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK UNESA, Vol. 8, No. 1 hal. 3.

yang berasal dari sumber – sumber kepustakaan yang telah tersedia sebelumnya.⁵⁷ Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sumbernya melainkan melalui sumber – sumber kepustakaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan, jurnal, publikasi pemerintah, dan literatur lainnya.⁵⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data yang berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, berita, dan laporan resmi pemerintah, dan laporan resmi organisasi internasional untuk mendukung penelitian ini. Peneliti akan menggunakan data dari sumber daring seperti artikel dan situs web. Data yang didapatkan secara daring diperbolehkan selama berasal dari sumber yang valid.⁵⁹

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti data non numerik sehingga tidak menggunakan metode akurasi statistik.⁶⁰ Teknik analisis data ini biasanya digunakan dalam meneliti sebuah fenomena, peristiwa, wilayah, negara, organisasi, individual.⁶¹ Penggunaan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian studi hubungan internasional biasanya menyertakan studi kasus dan observasi.⁶² Dalam teknik analisis kualitatif proses menyimpulkan data dan fenomena sebab akibat dilakukan dengan penalaran induktif dan deduktif. Dengan

⁵⁷ Melissa Johnston. 2014. Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, hlm. 619 –626

⁵⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, pg 137.

⁵⁹ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press

⁶⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*, dalam Silalahi, Ulber (ed), 2006, *Metode Penelitian Sosial*, UnparPress, Bandung, pg. 39.

⁶¹ Berg dan Lune dalam Christopher Lamont, 2015, *Research Methods in International Relations*. Sage Publication.

⁶² Christopher Lamont., *Op. cit.* hal. 89

menggunakan teknik analisis kualitatif peneliti dapat menjelaskan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.⁶³

1.7.5 Sistematika Penulisan

Demi memberikan pemahaman yang terarah, fokus dan substantif, dalam penelitian ilmiah ini akan dibagi menjadi substansi – substansi sebagai berikut: **BAB I.** Berisikan latar belakang permasalahan dari penelitian ini, rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan India memilih Korea Selatan dalam kebijakan *Act East Policy* melalui pemahaman *strategic partnership* dengan indikator *Partner Selection* yaitu berupa kepentingan strategis yang cocok dan evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan dari mitra yang berpotensi

BAB III. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan India memilih Korea Selatan dalam kebijakan *Act East Policy* melalui pemahaman *strategic partnership* dengan indikator *Partner Selection* yaitu berupa evaluasi kekuatan calon mitra dan kegunaannya bagi kepentingan sendiri, dan kompatibilitas (visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan

⁶³ Neuman W Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon., hal. 477

konteks sejarah) yang mendorong dikeluarkannya kebijakan *Act East Policy* terhadap Korea Selatan.

BAB IV. Analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan beserta kritik dan saran.